

SKRIPSI

**ANALISIS PENEGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT BUMDES
HAYATI DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
TENGAH**



Oleh:

JERRY ADRIYANTO
165310306

PROGAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : JERRY ADRIYANTO
NPM : 165310306
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENEGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT BUMDES HAYATI DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam **institution paper repository**, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit BUMDes Hayati Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan penginformasian pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Yang memberikan pernyataan,



Jerry Adriyanto

NPM : 165310329

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim,

Puji syukur kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunianya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEKENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT BUMDES HAYATI DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH”**, ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Islam Riau.

Pada saat proses pengerjaan skripsi ini penulis banyak mendapatkan perhatian, bimbingan, dukungan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Syahrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 dan Penasehat Akedemi penulis di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Riau yang banyak bersabar, mendengar, dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Alfurkaniati, SE, M.Si., AK., CA selaku pembimbing yang telah banyak bersabar menghadapi penulis, dan telah meluangkan waktu, perhatian, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Pak Hariyanto selaku direktur BUMDes Hayati Desa Penghidupan dan ibu Isma Wati selaku sekretaris BUMDes, yang telah banyak memberi dukungan, bantuan dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih banyak kepada bapak Adnan, dan ibuk Elisma, selaku orang tua penulis yang telah banyak bersabar, mendukung serta mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih untuk Alpianto, Dwi Atmojo, Selamat Okta Kurniawan, Muhamad Rifki, Muhamad Tahir lubis, atas kebersamaan kalian dan pengalaman selama masa kuliah yang menyenangkan, semoga kita dapat sukses bersama-sama nantinya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis,

Jerry Adriyanto



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

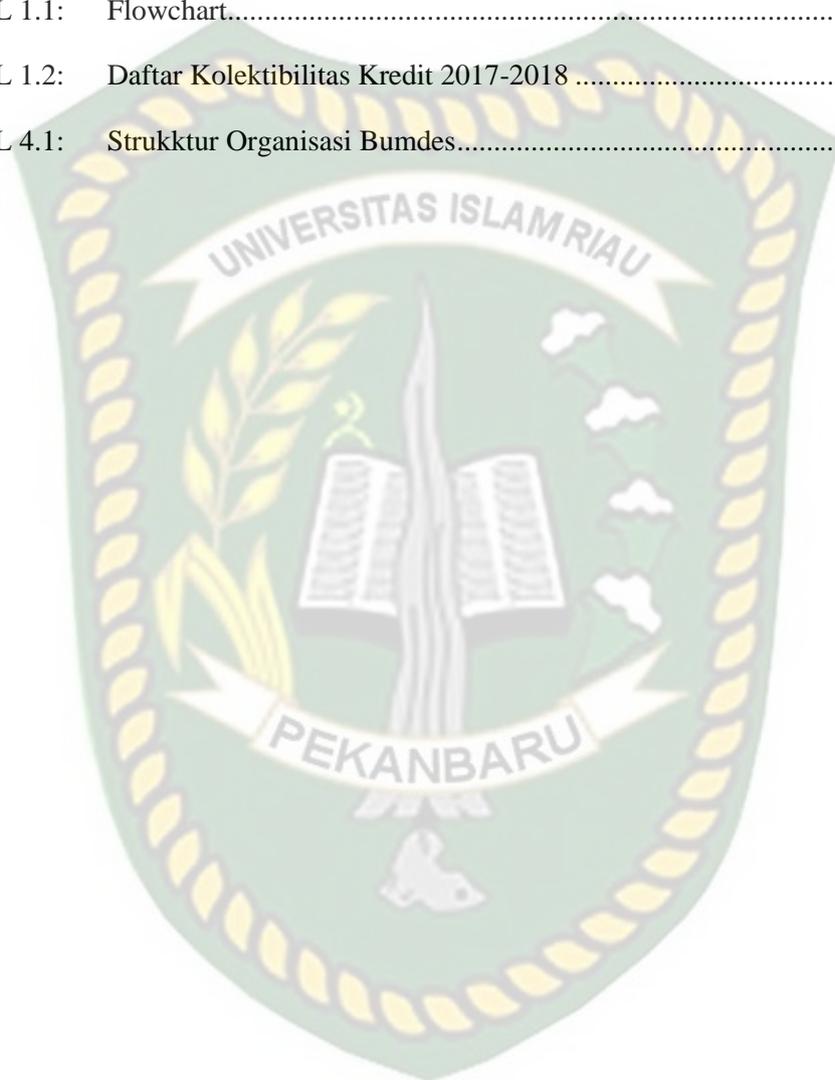
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern	10
2.1.2 Tujuan dan Manfaat pengendalian Intern	11
2.1.3 Komponen Pengendalian Intern	12
2.1.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal	14
2.1.5 Pengertian dan Jenis Kredit	15
2.1.6 Unsur-Unsur Kredit	17
2.1.7 Penentuan Kebijakan Kredit	18

2.1.8 Penggolongan Kolekbilitas Kredit	19
2.1.9 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.2 Hipotesis	22
BAB III : METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Objek Penelitian	23
3.5 Jenis Data Dan Sumber Data	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data	25
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.2 Hasil Penelitian.....	30
4.3 Pembahasan.....	35
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1:	Flowchart.....	5
TABEL 1.2:	Daftar Kolektibilitas Kredit 2017-2018	6
TABEL 4.1:	Struktur Organisasi Bumdes.....	28



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1: Struktur Organisasi Bumdes..... 28



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Laporan Posisi Keuangan Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir 2017 & 2018
- Lampiran II Laporan laba rugi Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir tahun 2017 & 2018
- Lampiran III Laporan Daftar Inventaris Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir 2017 & 2018
- Lampiran IV Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- Lampiran V Foto Dokumentasi
- Lampiran VI Buku Harian Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Tahun 2017 & 2018
- Lampiran VII Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- Lampiran VIII Akad Badan Usaha Milik Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Hilir

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit yang diterapkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Hayati desa penghidupan, untuk mengetahui apakah pengendalian intern sistem pengendalian kredit yang terdapat pada BUMDes Hayati sudah sesuai dengan unsur pengendalian intern menurut Mulyadi, dan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan oleh BUMDes Hayati.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, untuk menganalisis data yang diperoleh oleh penulis menggunakan metode deskriptif yaitu melakukan perbandingan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang berkaitan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagian besar pengendalian intern BUMDes Hayati sudah berjalan dengan baik tapi dalam pemberian kredit terutama kredit macet masih bermasalah dan meningkat 1% dari tahun 2017 ke 2018.

Kata kunci : sistem, pengendalian intern, pemberian kredit, BUMDes Hayati

ABSTRACT

The research objective is to find out how the credit disbursement system implemented in the Village Owned Enterprise (BUMDes) Bina Hayati livelihood village, to find out whether the internal control of the credit control system contained in the BUMDes Hayati is in accordance with the internal control elements according to Mulyadi, and to determine the effectiveness credit distribution internal control system implemented by BUMDes Hayati.

This research is a qualitative research, and the techniques used in collecting data are interviews and documentation, to analyze the data obtained by the author using the descriptive method, namely making comparisons between the data that has been collected with related theories and presented in the form of research results. The results obtained in the study are that most internal controls for BUMDes Hayati have been running well, but in providing credit, especially bad credit is still problematic and has increased by 1% from 2017 to 2018.

Keywords : system, internal control, credit extension, BUMDes Hayati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian intern merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha. Dengan adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Menurut Mulyadi (2016:129) Tujuan dan manfaat pengendalian pengendalian intern perusahaan adalah a) Menjaga kekayaan organisasi, b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, c) Mendorong efisiensi, d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Tujuannya pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi,

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan yang tujuannya untuk mendorong efisiensi dan dari kepatuhan manajemen perusahaan.

Kredit merupakan pinjaman yang diberikan oleh debitur kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dalam jangka waktu tertentu, dari pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman beserta bunga atau jasa pinjaman. Untuk dapat mencegah hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak usaha simpan pinjam maka sangat perlu adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik.

Kredit yang diberikan pada usaha simpan pinjam kepada debiturnya mengandung resiko, karena mudah diselewengkan dan disalah gunakan karena adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan kredit benar-benar diberikan kepada nasabah yang dapat dipercaya untuk dapat melunasinya tepat waktu.

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan

BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius agar dapat BUMDesa dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

BUMDes berfungsi untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit ke masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi yang produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perindividu maupun kelompok dari masyarakat.

BUMDes Hayati dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di desa Penghidupan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Dalam menjalankan usaha BUMDes Hayati desa Penghidupan secara umum menyalurkan dana usahanya kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam, kegiatannya meliputi, memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa yang dinilai produktif dan konsumtif, serta pembiayaan lainnya. BUMDes Hayati memiliki prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat yang ingin meminjam, adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit sebagai berikut:

Tahap pertama nasabah harus mendatangi BUMDes Hayati untuk pengajuan permohonan peminjaman secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang harus dilampirkan diantaranya, foto copy KTP, foto copy KK, rencana usaha keluarga (RUA), pernyataan kesediaan anggunan, pas foto, dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 15.000.

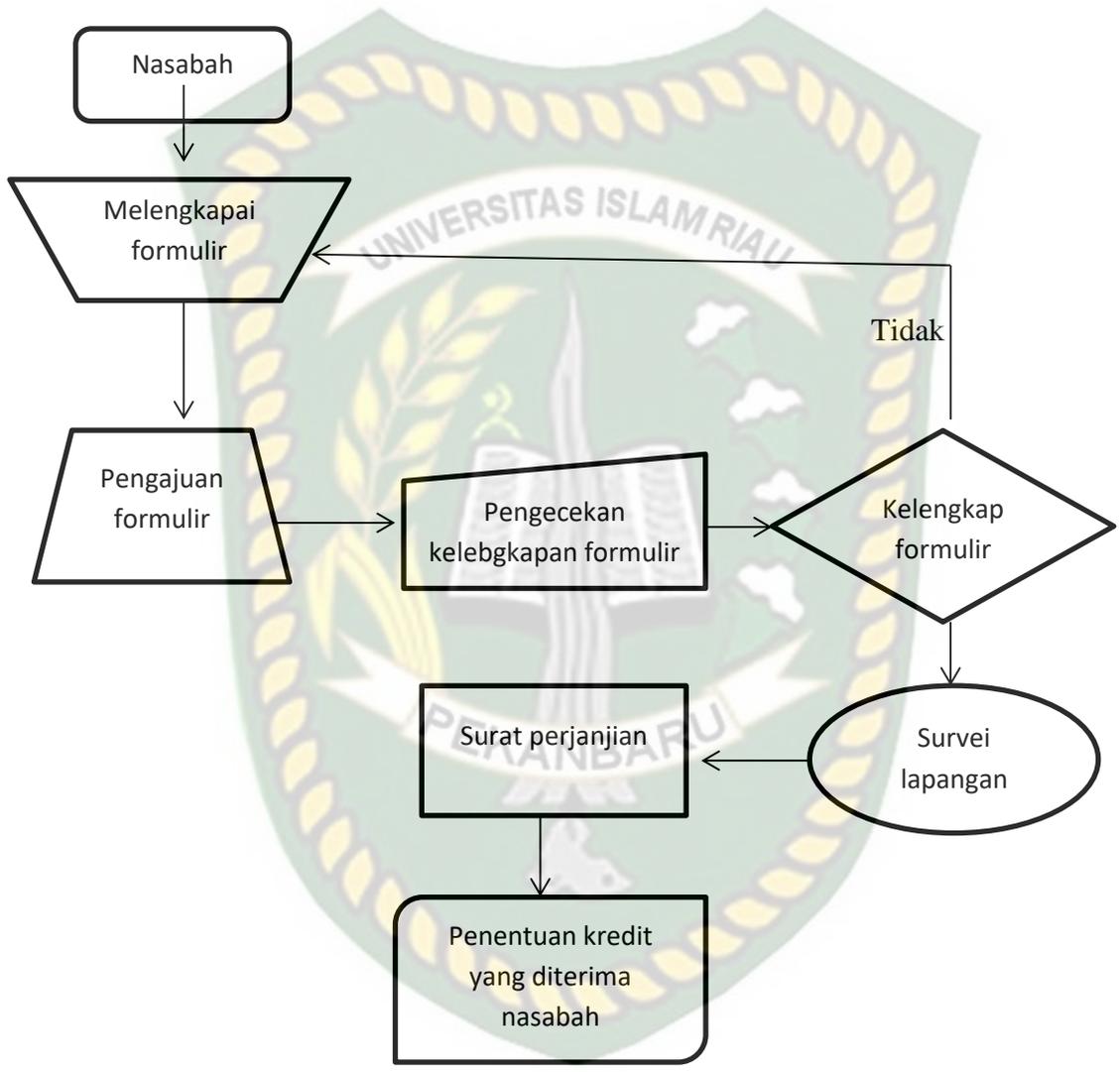
Tahap kedua sekretaris BUMDes Hayati melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat-syarat yang telah diajukan nasabah, apabila ditemukan tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan nasabah maka akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Tahap ketiga adalah persetujuan, BUMDes Hayati akan melakukan survei lapangan, apakah menyetujui pemberian kredit oleh calon peminjam atau tidak.

Tahap keempat membuat surat perjanjian pemberian kredit Antara nasabah dengan BUMDes Hayati

Tahap kelima ketua BUMDes akan menetapkan jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan besarnya anggunan yang diberikan untuk menjamin pengembalian kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

Flowchart 1.1
BUMDes Hayati
Tahap Pengajuan Peminjaman



Jika dilihat dari jumlah kredit yang telah disalurkan oleh BUMDes Hayati selama hampir dua tahun terdapat kredit yang bermasalah :

Tabel 1.2
BUMDes hayati
Daftar Kolektibilitas Kredit
Tahun 2017-2018

Kolektibilitas	2017	Persentase
Kredit Lancar	Rp. 559,452,278	90%
Kredit Macet	Rp. 58,169,722	10%
Jumlah	Rp. 617,622,000	100%
Kolektibilitas	2018	Persentase
Kredit Lancar	Rp. 555,838,000	84%
Kredit Macet	Rp. 90,077,000	16%
Jumlah	Rp. 645,915,000	100%

Sumber : BUMDes Hayati Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan kredit macet baik dari sisi jumlah kredit dan persentase. Kredit macet meningkat dari Rp. 58,169,722 dengan persentase 10% pada tahun 2017 menjadi Rp. 90,077,000 dengan persentase 16% pada tahun 2018.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Analisis pengendalian intern pemberian kredit BUMDes Hayati Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit pada BUMDes Hayati Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah telah berjalan secara efektif.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern dalam penyaluran kredit yang diterapkan BUMDes Hayati.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi keuangan sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran, bahan bacaan dan untuk referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang
- b. Memberikan masukan bagi BUMDes Hayati dalam menciptakan pengendalian intern yang baik terhadap penyaluran pemberian kredit yang dapat diberikan secara efektif
- c. Bagi penulis, menambah wawasan terutama dalam hal pengendalian intern untuk usaha berbentuk BUMDes

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan untuk skripsi pada topic penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah diuraikan dengan jelas sehingga dapat menjadi sumber dasar rumusan masalah penelitian

Bab II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Bab ini terdiri dari pengertian pengendalian intern, tujuan dan manfaat pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, aktivitas pengendalian, pengertian dan jenis kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, Penggolongan Kolektibilitas Kredit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bab III :Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data

Bab IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit kepada nasabah BUMDes

Bab V :Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian penulisan dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian internal adalah rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan hubungan keuangan, keamanan sumber daya, dan kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan kebijakan kepada orang lain.

Sistem pengendalian internal juga dikenal sebagai kontrol internal yang merupakan proses yang dipengaruhi oleh personel dan sistem teknologi informasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penipuan (fraud) dan melindungi baik fisik (mesin dan properti) dan tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang) sumber daya organisasi. Pengendalian internal berisi struktur, metode, dan langkah-langkah organisasi yang terkoordinasi untuk menjaga kesejahteraan organisasi, memeriksa kebenaran dan keandalan data akuntansi, dan untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan pedoman manajemen.

Menurut Mulyadi (2016:129). *“sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”*.

Menurut Hery (2013:159). *“pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalagunaan, dan menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat”*.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016:129) *“Tujuan Sistem Pengendalian Internal”* adalah :

- a) melindungi aset organisasi
- b) memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c) mendorong efisiensi usaha
- d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Adapun manfaat pengendalian intern adalah membentuk suasana profesional dalam sebuah organisasi, mengurangi resiko kredit macet, pengendalian mutu manajemen berjalan sesuai dengan diharapkan dan menunjang perusahaan untuk meraih profit.

2.1.3 Kompen Pengendalian Intern

Menurutm Institut Akuntan Publik Indonesia (2011;319) komponen pengendalian intern adalah sebagai berikut;

- a) Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu usaha perusahaan yang terdiri dari beberapa elemen:
 1. Integritas dan nilai etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Partisipasi dewan komisaris/komite audit
 4. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 5. Struktur organisasi
 6. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
 7. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia
- b) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dan pencapaian tujuan entitas aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur berkaitan sebagaiberikut:
 1. Pemisahan tugas yang cukup
 2. Otoritas yang pantas transaksi dan aktivitas
 3. Dokumen catatan yang memadai
 4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

5. [engecekan dan independen atas pelaksanaan
- c) Penilaian resiko manajemen adalah indentifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Resiko dapat berubah atau timbul karena keadaan:
1. Sistem informasi baru yang dapat diperbaiki
 2. Personel baru
 3. Pertumbuhan yang pesat
 4. Perubahan dalam lingkungan operasi
 5. Restrukturasi
 6. Teknologi baru
 7. Operasi luar negeri
 8. Penerbitan standar akuntansi baru
- d) Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan pelaporan transaksi entitas untuk menyenenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva , utang, ekuitas yang bersangkutan. Sistem informasi mencakup metode dan pencatatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- e) Pemantauan dalam perbankan khususnya pemberian kredit sebaiknya dilakukan sebelum ataupun sesudah pencairan kredit tersebut dicairkan karena setelah kredit diberikan tanggungjawab bank dan tidak harus lepas. Pihak bank harus menganalisa kemungkinan pengembalian dan kemacetan kredit setelah kredit tersebut dicairkan. Singkatnya pemantauan adalh proses yang menentukan kualitas intern sepanjang waktu.

2.1.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2016:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

- a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c) Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.5 Pengertian dan Jenis Kredit

a) Pengertian Kredit

Menurut Thamrin (2012:162). *Kata kredit berasal dari bahasa Yunani Credere yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.*

Menurut Ariyanti (2011:2). *“kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang”.*

b) Jenis – Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:109) secara umum jenis-jensi kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain

a) Di lihat dari segi kegunaan terdiri dari :

1. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek guna keperluan rehabilitas, misalnya kredit guna membangun pabrik dan membeli mesin – mesin.

2. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek. Misalnya untuk membeli bahan bahu, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya.

- b) Di lihat dari segi kegunaan terdiri dari :
1. Kredit Investasi
Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek guna keperluan rehabilitas, misalnya kredit guna membangun pabrik dan membeli mesin – mesin.
 2. Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek. Misalnya untuk membeli bahan bahu, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya.
- c) Di lihat dari tujuan kredit terdiri lagi :
1. Kredit produktif
Kredit yang di gunakan peningkatan usaha , produksi atau investasi di mana kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
 2. Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan yang di berikan pada pedagang dalam rangka memperlancar dan memperluas kegiatan perdagangannya. Misalnya untuk membeli barang dagangannya yang di berikan pada agen
- d) Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang di gunakan untuk keperluan pribadi, dalam kredit ini tidak terdapat pertambahan barang dan jasa yang di dihasilkan, karena telah di gunakan oleh perseorangan dan badan usaha. Misalnya kredit mobil pribadi dan kredit perumahan.

2.1.6 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:114). Ada pun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredita adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (rentenir) bahwa kredit yang diberikan berupa uang akan benar-benar di terima kembali dimasa mendatang.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini biasanya berupa jumlah pinjaman, tingkat bunga, lama pinjaman, ataupun jaminan jika ada.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat di akibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang di akibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang di akibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan rentenir berasal dari bunga pinjaman dan biaya administrasi jika ada.

2.1.7 Penentuan Kebijakan Kredit

Menurut Kasmir (2011: 107) menjelaskan bahwa untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 5C adalah sebagai berikut :

- a) Karakter, yaitu keyakinan bahwa sifat dari calon nasabah yang akan di beri akn kredit benar – benar dapat di percaya. Hal tersebut tercermin dari latar belakang nasabah, baik dari sifat pekerjaan maupun sifat pribadi dari nasabah, seperti gaya hidup yang di jalani serta keadaan keluarganya.
- b) Modal, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.
- c) Kemampun, yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- d) Jaminan, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

- e) Kondisi, menilai kondisi ekonomi, politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil

2.1.8 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kualitas suatu kredit dapat diketahui dengan cara melakukan penilaian kualitas kredit tersebut. Menurut Etty mulyati (2016:201-202) penilaian kolektibilitas atau kualitas kredit ditetapkan sebagai berikut:

a) Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan. Artinya, tidak ada tunggakan bunga ataupun angsuran pokok, pinjaman belum jatuh tempo, semua kewajiban diselesaikan oleh nasabah secara baik. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b) Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Kredit yang selama 1-2 bulan, mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak angsuran pokok dan/atau bunga. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

c) Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau angsuran pokoknya tidak baik karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan yang dihadapi debitur. Usaha-usaha pendekatan oleh bank telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari

d) Kredit Diragukan

Kredit diragukan, yaitu kredit yang sudah tidak lancar dan sudah jatuh temponya, tetapi belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulau diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Terdapat tunggakan 120 hari sampai dengan 180 hari.

e) Macet

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit tidak lancar dan usaha tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

2.1.9 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memnuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan,

menambah wawasan masyarakat desa. Aturan pendirian BUMDes ini diatur pula dalam undang-undang republik Indonesia nomr 6 tahu 2014 tentang desa. Pasal 87 :

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- b) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- c) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan

Pada dasarnya pendirian dan penelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT dan diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296 pada 18 Februari 2015. Dalam pengelolaan aset BUMDes mempunyai landasan aturan Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang tatacara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa

Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk Perseroan ataupun Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk kesejahteraan desa, sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini tentang Bumdes.

Pasal 8 BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

2.2 . Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta didukung oleh landasan teoritis yang telah dikemukakan pada telaah pustaka, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit pada BUMDes Hayati Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum berjalan secara efektif.”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012:60) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, persepsi secara individual maupun kelompok

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hayati yang berlokasi di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah. BUMDes Hayati merupakan sebuah lembaga yang desa yang menyalurkan dana kemasyarakatan dalam bentuk simpan pinjam. Penulis memilih BUMDes Hayati sebagai objek penelitian karena, disana terdapat fenomena yang layak untuk diteliti dari dua tahun terakhir terdapat kredit macet yang meningkat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari pengurus BUMDes Hayati pada bagian administrasi tentang kegiatan usaha BUMDes, kebijakan akuntansi yang diteraokan, dan struktur organisasi BUMDes.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun oleh pengurus BUMDes, seperti laporan neraca, laporan arus kas, dan daftar inventaris.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dan dari informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak pengurus dan karyawan BUMDes tentang masalh yang diteliti, meliputi kegiatan usaha, sejarah perkembangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau laporan keuangan yang diperoleh dari bagian akunting BUMDes Bina Harapan berupa Laporan Laba rugi, neraca, arus kas, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini maka penulis melakukan analisis data secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, melaporkan, dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga dapat dipertimbangkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan selanjutnya diambil suatu kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

4.1.1 Sejarah Singkat BUMDes

BUMDes Hayati berdiri pada tanggal 15 oktober 2013 yang pada saat itu bernama UED-SP dan pada tanggal 27 mei 2016 berubah menjadi BUMDes. BUMDes Hayati didirikan berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

BUMDes Hayati merupakan lembaga kredit mikro milik desa penghidupan dimana organisasi yang bergerak pada bidang simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat desa. Di dalam rapat dan musyawarah desa tentang struktur organisasi BUMDes Hayati, diamana dalam musyawarah pertanggungjawaban inilah diambil keputusan semua kebijakan tentang pengelolaan BUMDes Hayati termasuk pemilihan pengola secara demokratis.

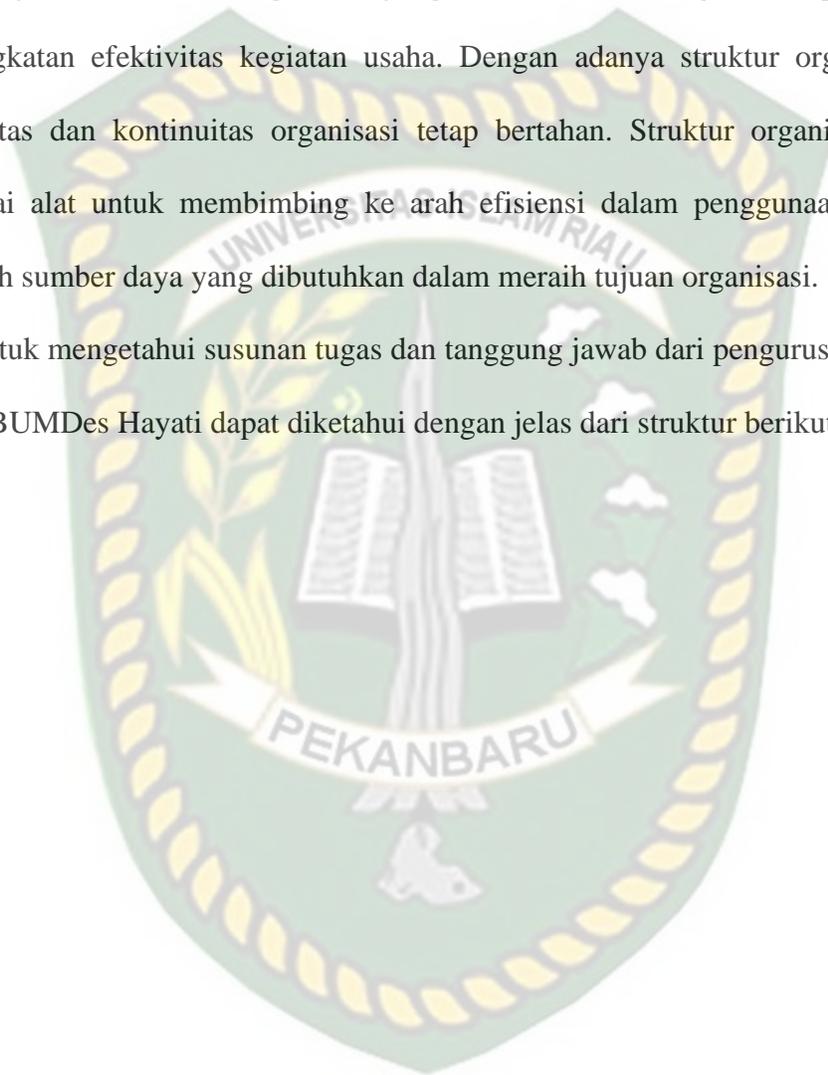
4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan

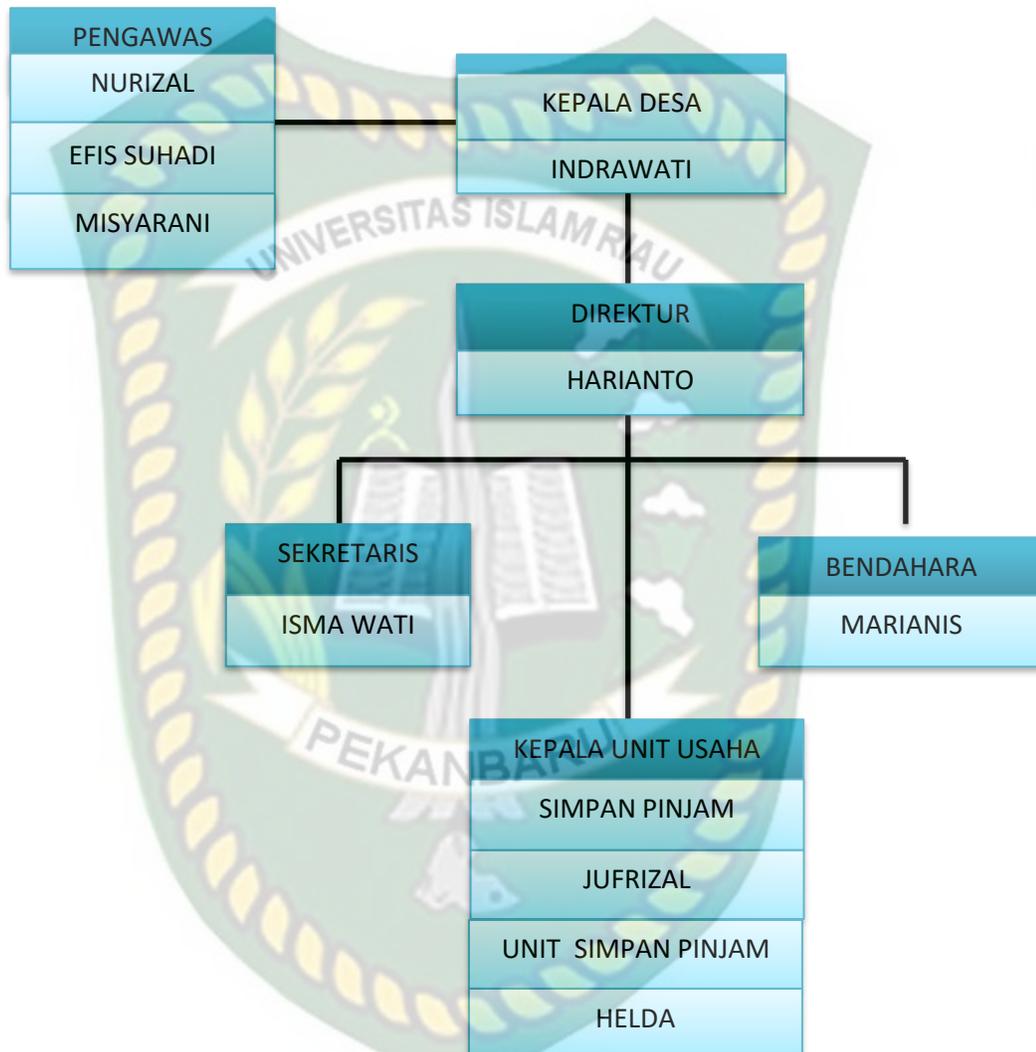
organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan.

Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi.

Untuk mengetahui susunan tugas dan tanggung jawab dari pengurus dan pelaksana pada BUMDes Hayati dapat diketahui dengan jelas dari struktur berikut ini:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi
BUMDes Hayati



a) Komisaris Bumdes

Penasehat atau Komisaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Komisaris bumdes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

b) Pengawas Bumdes

Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

c) Direktur Bumdes

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

d) Sekertaris BUMDes

Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa.

e) Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

f) Manajer Unit Usaha BUMDes

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

4.1.3 Aktivitas BUMDes

BUMDes Hayati desa penghidupan adalah lembaga yang memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa, baik simpanan pokok anggota BUMDes, simpanan wajib, dan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya, dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit

BUMDes Hayati memiliki prosedur dalam pemberian kredit kepada masyarakat, yang harus diikuti dalam mengajukan peminjaman. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan kredit yang disalurkan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan analisis terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah atau peminjam.

Pemberian kredit yang dilakukan BUMDes Hayati kepada para nasabah harus mengikuti beberapa prosedur, yaitu:

a) Pengajuan akad Kredit

Untuk memperoleh kredit pada BUMDes Hayati nasabah wajib mengajukan permohonan peminjaman wajib mengisi formulir yang telah disediakan pihak BUMDes Hayati. Dalam hal ini BUMDes Hayati menetapkan syarat-syarat calon nasabah yang dapat meminjam diantaranya :

- a) Warga desa penghidupan
- b) Memiliki usaha dan rencana
- c) Dinilai layak
- d) Untuk peminjaman nasabah wajib menggunakan anggunan

Apabila persyaratan diatas terpenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan kepala unit simpan pinajm, maka nasabah dapat mengajukan akad dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Pas foto 3x4
3. Surat anggunan
4. Biaya administrasi Rp. 15000
5. Biaya keamanan anggunan Rp. 20.000 tergantung besarnya nilai anggunan

Jika persyaratan diatas sudah lengkap diantar langsung ke bagian unit simpan pinjam yaitu Helda , selaku bagian pemeriksaan kelengkapan dokumen. Untuk rencana usaha pada BUMDes Hayati tidak membedakan berdasarkan jenis usaha calon nasabah, ada juga yang meminjam untuk keperluan pribadi seperti pelengkapan rumah, Hp, dan lain-lain, hal ini dapat dilihat pada lampiran. Ada atau tidak nya rencana usaha nasabah bukan menentukan seseorang layak diberi kredit atau tidak karena yang paling menjadi bahan pertimbangan pihak BUMDes adalah kepercayaan dan kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh debitur.

b) Penyelidikan Berkas

Pada tahap ini staf BUMDes Hayati akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan mulai dari anggunan yang di jadikan jaminan, membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas yang ada.

c) Penilaian Kelayakan Kredit

Tahap selanjutnya melakukan analisis kredit yang dilakukan oleh unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit, penilaian tersebut dapat dilihat dari berkas yang di ajukan oleh pihak peminjam.

d) Wawancara

Pihak BUMDes Hayati belum melakukan wawancar dengan efektif. Wawancara termasuk salah satu elemen penting sebelum memberikan kredit, wawancara dilakukan analisis kredit guna untuk menyesuaikan dengan akad yang diajukan. Setelah dinilai cocok maka, unit simpan pinjam akan melakukan survei lapangan

e) Survei Lapangan

Pada tahap ini berkas yang sudah ada dianggap layak akan ditindak lanjuti oleh kepala unit dan unit untuk dilakukan survei lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesuaian segala keterangan calon nasabah dengan berkas-berkas yang dilampirkan, dan memastikan anggungan yang diajukan dalam keadaan tidak bermasalah kepemilikan asetnya.

f) Keputusan Kredit

Setelah melewati beberapa prosedur, selanjutnya hasil pemeriksaan staf BUMDes dalam musyawarah dengan kepala desa dan disimpulkan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan kepada calon nasabah. Jika kredit tersebut layak diberikan maka BUMDes Hayati akan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akad kredit yang akan ditanda tangani
2. Jumlah kredit yang akan disalurkan kepada debitur
3. Jangka waktu kredit
4. Biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan penandatanganan akad kredit. Penandatanganan ini dilakukan secara langsung oleh debitur dengan pihak BUMDes Hayati.

g) Realisasi kredit

Kegiatan terakhir dalam pemberian kredit adalah realisasi kredit. Realisasi kredit yang diberikan kepada debitur jika dihadap oleh direktur dan direksi keuangan. Stelah dicairkan direksi keuangan akan mencatat dalam pengeluaran kas.

h) Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk mengawasi peminjam atau debitur dalam mengembalikan kredit atau pinjaman, pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pihak BUMDes Hayati kepada debitur adalah dalam penggunaan dan kredit apakah sudah digunakan dengan semestinya atau tidak, namun pemantauan ini tidak dilakukan oleh BUMDes. Berikutnya baru dilakukan pemantauan pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam mengembalikan kredit. Akibatnya terdapat beberapa nasabah yang tidak menggunakan pinjaman kredit dengan semestinya contohnya nasabah tersebut tidak menggunakan modal untuk usaha tapi malah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga nasabah tersebut kesulitan mengembalikan pinjaman.

Dari prosedur tersebut pemberian kredit yang dilakukan oleh BUMDes Hayati terdapat beberapa kelemahan, pihak BUMDes belum memeriksa secara teliti keabsahan data-data yang dilampirkan seperti kepemilikan anggungan serta data sejak kapan usaha tersebut didirikan. Ketika melakukan survei lapangan pihak BUMDes tidak melakukan peninjauan atau pemantauan secara berkala kelokasi usaha peminjam apakah usaha itu masih berjalan atau tidak, dan pihak BUMDes Hayati belum melakukan wawancara secara maksimal kepada calon peminjam, wawancara semestinya dilakuan untuk mengetahui kebenaran atas berkas-berkas yang dilampirkan oleh peminjam sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya debitur mendapatkan kredit.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Sistem Pengendalian Intern

a) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab kepada bagian-bagian tugas organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam tanggungjawab fungsional suatu bagian tidak boleh diberikan tanggungjawab ganda dalam melaksanakan tugasnya.

BUMDes Hayati belum melakukan pemisahan fungsi dan tanggungjawab dengan baik, karena kepala unit simpan pinjam Jufrizal dan unit Helda yang bertugas sebagai staf keuangan simpan pinjam yang tugasnya mencatat kas keluar dan kas masuk ikut dalam melakukan survey lapangan yang seharusnya dilakukan oleh unit yang dikhususkan bertugas untuk melakukan survey lapangan, hal ini mengakibatkan terjadinya kredit macet dikarenakan tidak adanya unit yang bertugas untuk melakukan pemantauan secara berkala kepada peminjam yang membuat usaha atau berdagang.

b) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Dalam sebuah organisasi harus ada sistem otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi dan aktivitas dalam suatu organisasi agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan transaksi.

BUMDes Hayati sistem otoritas sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap realisasi kredit. Pada proses pemberian kredit, dana yang diberikan kepada peminjam harus mendapat otoritas dari kepala desa setelah itu baru diserahkan kepada ke pengelola BUMDes untuk mendapatkan otoritas dari direktur BUMDes.

Prosedur pencatatan pada BUMDes Hayati telah berjalan dengan baik. Pada dasarnya sistem pencatatan BUMDes bersifat sederhana setiap terjadinya transaksi direkam dalam bentuk laporan kas masuk dan kas keluar yang kemudian dimasukkan dalam kas harian dan masukkan kedalam jurnal memorial, sedangkan untuk laporan keuangan BUMDes telah dirancang sesuai kebutuhan pencatatan akuntansi.

c) Karyawan Yang Kompeten

Untuk mencapai tujuan dalam perusahaan karyawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pada BUMDes Hayati telah mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan manajemen yang ada. Namun penempatan karyawan belum sesuai keahlian, pengelola BUMDes bukan merupakan karyawan yang berpengalaman dalam bidangnya. Tetapi itu tidak bermasa karena adanya pelatihan dan arahan dari direktur BUMDes serta pengalaman yang sudah bertahun-tahun maka karayawannya bisa bekerja dengan baik. Tapi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit macet dikarenakan kurangnya pemantauan kepada debitur secara berkala. Dengan demikian BUMDes Hayati memiliki kriteria karyawan yang kompeten

d) Praktik yang sehat

Dalam organisasi perlu adanya Pratik yang sehat salah satunya dengan internal cek dalam setiap tugas suatu organisasi. Praktek yang sehat dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan tanggungjawab fungsional sistem wewenang dan prosedur pencatatan berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Praktik yang sehat dalam BUMDes Hayati belum berjalan dengan baik, karena staf BUMDes sudah beberapa kali diganti dengan alasan berhenti bekerja dan tidak pernah melakukan perputaran jabatan. Cuti karyawan tidak pernah diberikan karena jumlah karywan yang terbatas kecuali karaywan yang sedang hamil. Dengan adanya cuti bagi karyawan bisa membuat kesehatan fisik, mental karyawan terjaga, dan meningkatkan produktivitas kerja terjaga dengan demikian BUMDes bisa menimalisir terjadinya kredit macet. Dengan demikian BUMDes Hayati ini belum melaksanakan praktik yang sehat dalam pengendalian intern.

4.3.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah pada BUMDes Hayati pada tahun 2017 dan tahun 2014 yaitu nasabah mengalami ketidak tepat waktu dalam pembayaran kredit. Kredit bermasalah yang dihadapi BUMDes Hayati merupakan salah satu indikasi pengendalian intern penyaluran kredit yang dijalankan BUMDes Hayati.

Kredit bermasalah pada BUMDes Hyati Pada tahun 2017 dan 2018 yaitu nasabah mengalami ketidak tepat waktu dalam pembayaran kredit. Adapun tingkat macet diskotor perdagangan dikrenakan antara lain:

- a) Nasabah salah urus dalam pengelolaan usaha dagangnya atau karena belum berpengalaman dalam bidang usaha yang di tangani.
- b) Dari segi BUMDes juga berpengaruh dengan meningkatnya kredit macet dikarenakan kelemahan bumdes dalam menganalisis sehingga salah dalam membuat keputusan pemberian kredit serta lemahnya dalam melakukan pengawasan.

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak BUMDes Hayati terhadap nasabah yang mempunyai tunggakan kredit dengan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah yang mengalami tunggakan kredit. Surat peringatan (SP) dilakukan sampai tiga kali, apabila telah diberikan surat peringatan ketiga (SP3) nasabah belum mengangsur pinjaman maka BUMDes Hayati akan melakukan musyawarah dengan nasabah dengan membayar angsuran pokok tanpa bunga untuk beberapa kali angsuran. Jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran maka pihak BUMDes Hayati akan melakukan penahanan terhadap anggunan sampai nasabah menyelesaikan tunggakan kreditnya.

Upaya penyelesaian kredit yang dilakukan BUMDes Hayati merupakan upaya untuk mengembalikan seluruh piutang pada pinjaman terhadap resiko kerugian yang dialami oleh pihak BUMDes Hayati. Sebagian nasabah belum berpartisipasi secara maksimal dalam upaya yang dilakukan oleh piha BUMDes dalam menyelamatkan kreditnya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem pemberian kredit dan pengendalian intern yang dilakukan oleh BUMDes Hayati maka disimpulkan sebagai berikut:

- a) Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BUMDes Hayati sudah sesuai dengan standar pemberian kredit
- b) BUMDes Hayati di unti sinpan pinjam belum bisa di katakana karyawan yang kompeten dikarenakan masih ada kredit macet
- c) Sistem wewenang belum berjalan dengan baik dalam hal pemantauan kepada debitur yang meminjam untuk berdagang
- d) Lemahnya BUMDes dalam menganalisis dan membuat keputusan kepada nasabah sehingga terjadi kredit macet

5.2 Saran

BUMDes harus memiliki unit simpan pinjam yang ditugaskan khusus untuk melakukan pemantauan secara berkala dan lebih ditingkatkan lagi pengawasannya kepada nasabah yang meminjam terutama dalam sektor perdagangan agar menggunakan pinjaman tersebut untuk usahanya bukan untuk keperluan pribadi agar dapat memperkecil resiko kredit macet.



DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus dan Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: Penerbit : Alfabeta.
- Hery. 2013. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Penerbit : Prenada Media Group.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit : Rajagrafindo Persada.
2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit : Rajagrafindo Persada.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*, edisi 4. Jakarta: Salemba empat.
- Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*. Jakarta: Penerbit : Refika Aditima
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Penerbit : Alfabeta.
- Sukmadinata. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit : Remaja Rosdakarya.
- Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Pustaka Baru
- thamrin. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2015. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

